

## KETEGANGAN HUBUNGAN JEPANG - KOREA SELATAN DAN IMPLIKASINYA

7

Lisbet

### Abstrak

*Hubungan Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mengalami ketegangan pada saat Jepang mengeluarkan kebijakan memperketat ekspor bahan teknologi tinggi untuk memproduksi layar telepon pintar dan chip ke Korsel. Hubungan keduanya semakin buruk akibat pengajuan permohonan dari warga Korsel ke Pengadilan agar mengizinkan Pemerintah Korsel menjual aset-aset Perusahaan Jepang di Korsel. Ketegangan hubungan kedua negara memang mudah terpicu akibat belum tuntasnya persoalan sejarah mereka. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN memiliki wawasan (outlook) mengenai masalah Indo-Pasifik. Konsep Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik merupakan konsep kerja sama negara-negara di sepanjang Samudera Hindia dan Pasifik yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hukum internasional. Indonesia berkepentingan agar ketegangan Jepang dan Korsel tidak semakin luas karena akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Hubungan strategis Indonesia dengan Jepang dan Korsel di bidang ekonomi perlu dipertahankan, dan DPR RI perlu mengawal dan mendukungnya. menjadikan G-20 sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. DPR RI, melalui aktivitas diplomasi parlemen, sudah seharusnya juga menjadi bagian yang ikut memperjuangkan kepentingan Indonesia tersebut.*

### Pendahuluan

Hubungan Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mengalami ketegangan sejak tanggal 4 Juli 2019. Saat itu, Kementerian Perdagangan Jepang mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bahan material teknologi tinggi untuk memproduksi layar telepon pintar dan chip ke Korsel. Pemerintah Jepang juga mengharuskan para eksportir mendaftarkan diri apabila

hendak mengekspor bahan baku semikonduktor ke Korsel. Bahan baku ini terkait dengan pembuatan produk lemari pendingin, farmasi, pengolahan logam dan semikonduktor.

Kebijakan Jepang tersebut menjadi pukulan bagi perusahaan-perusahaan besar di Korsel seperti *Samsung Electronics*, *SK Hynix*, dan *LG Display*. Dampak dari pengurangan ekspor bahan baku



Jepang ini akan terasa langsung pada industri ponsel cerdas dan semikonduktor yang menjadi andalan Korsel. Akibat kebijakan ini maka izin untuk setiap pengiriman ekspor lewat kapal dari Jepang ke Korsel dapat memakan waktu hingga 90 hari untuk kepengurusannya sehingga dapat memperlambat proses pengiriman bahan baku.

Keputusan Pemerintah Jepang ini diambil karena alasan keamanan nasional, sebagai bentuk pengawasan terhadap ekspor serta pemenuhan kewajiban internasional guna menjaga ketat alih teknologi tertentu yang dapat digunakan dalam bidang keamanan/militer (*Republika*, 3 Juli 2019). Merespons kebijakan Jepang tersebut, Pemerintah Korsel berencana mengadukan Pemerintah Jepang ke *World Trade Organisation* (WTO). Selain itu, warga Korsel pun sudah menarik produk-produk buatan Jepang yang dijual di Korsel seperti minuman beralkohol dan menolak tur paket wisata dari Jepang. Bahkan, jika konflik ini terus berlanjut, maka Korsel akan memboikot penjualan mobil-mobil mewah Jepang dan barang-barang retail yang dijual di Korsel.

Konflik Jepang-Korsel sangat mudah terpicu kembali karena belum tuntasnya penyelesaian sejarah kedua negara. Jika konflik keduanya tidak juga diselesaikan maka tidak hanya akan berdampak terhadap ketegangan hubungan kedua negara saja, melainkan juga menimbulkan masalah baru bagi stabilitas keamanan kawasan. Tulisan ini mengkaji bagaimana ketegangan hubungan Jepang-Korsel akan berimplikasi terhadap Kawasan Asia Pasifik.

## Sekilas Konflik Jepang-Korsel

Jepang dan Korsel memiliki sejarah kelam yang sering kali menjadi pemicu konflik meskipun kedua negara memiliki persamaan nilai dan budaya serta letak geografis yang berdekatan. Sejarah kelam terjadi sejak Semenanjung Korea menjadi jajahan Jepang pada tahun 1910. Selama penjajahan, ada banyak kebijakan yang merugikan warga Korsel, seperti melarang penggunaan bahasa Korea, memaksa warga Korsel menerima sistem penamaan Jepang, dan merekrut secara paksa para wanita Korsel untuk menjadi budak seks (*comfort women*) tentara Jepang.

Kebijakan dan perlakuan Jepang terhadap Korsel di masa lalu ini meninggalkan luka mendalam bagi warga Korsel. Bahkan luka ini menurun ke kalangan muda Korsel yang notabene tidak mengalami sejarah kelam tersebut. Ketegangan kedua negara disebabkan tuntutan warga Korsel terhadap Pemerintah Jepang untuk mengakui keterlibatan Pemerintah Jepang di masa lalu dalam terciptanya sistem "*comfort women*" serta bertanggung jawab terhadap para korban dari sistem ini. Tuntutan ini pun dibiarkan berlarut-larut karena inkonsistensi dari pemerintah Jepang dalam mengakui keterlibatan pemerintahannya di masa lalu tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam tuntutan Korsel tersebut.

Meskipun memiliki sejarah yang kelam, namun pada tahun 1965 Jepang dan Korsel telah menandatangani perjanjian yang isinya adalah menormalisasi hubungan antara Jepang dan Korsel. Adanya perjanjian ini dianggap menjadi momentum

penting bagi kedua negara untuk menyelesaikan sebagian besar dari tuntutan warga Korsel terhadap Jepang. Akan tetapi, kedua negara tidak pernah sepenuhnya berdamai meskipun perjanjian tersebut sudah ditandatangani. Masih banyak warga Korsel yang merasakan bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan mereka masih berjuang untuk melawan perjanjian tersebut sampai saat ini. Sementara Jepang berpendapat bahwa sejarah kelam tersebut sudah diselesaikan dengan adanya perjanjian tersebut.

Hubungan kedua negara juga diperburuk dengan adanya pengajuan permohonan warga Korsel, yang merupakan korban kerja paksa di era pendudukan Jepang, ke pengadilan. Permohonan yang diajukan oleh para warga Korsel ke Pengadilan agar mengizinkan Pemerintah Korsel untuk menjual aset-aset Perusahaan Jepang di Korsel dan hasil penjualan itu digunakan membayar kompensasi bagi para korban kerja paksa.

Salah satu target permohonan likuidasi paksa tersebut adalah Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi menjadi target karena tidak memberi apa pun dalam enam bulan terakhir terkait isu tersebut sehingga para korban pun mengajukan permohonan ke pengadilan. Jika permohonan para korban tersebut dikabulkan oleh pengadilan maka aset-aset Mitsubishi akan dilelang. Permohonan para korban itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung (MA) Korsel pada November 2018. MA menetapkan bahwa Mitsubishi harus membayar antara 80-150 juta won kepada masing-

masing penggugat. Para penggugat terbukti menjadi korban kerja paksa pada era pendudukan Jepang di Korsel pada tahun 1910-1945. Pada Oktober 2018, MA Korsel juga menghukum Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corps karena alasan sama. Kedua perusahaan tersebut harus membayar 100 juta won untuk masing-masing penggugat.

Menanggapi rencana permohonan para korban, Jepang menyebut adanya kemungkinan untuk membalas. Jika perusahaan Jepang terancam, Jepang terpaksa melakukan langkah yang dibutuhkan. Pemerintah Jepang berharap masalah tersebut dapat diselesaikan melalui saluran diplomatik. Pemerintah Jepang juga meminta masalah kerja paksa ini dapat diselesaikan lewat arbitrase pihak ketiga, seperti yang diatur dalam perjanjian tahun 1965. Pemerintah Korsel diberikan waktu untuk menanggapi permintaan itu dan masih belum ada tanda-tanda Pemerintah Korsel menyetujui permintaan itu.

Selain sejarah kelam, konflik Jepang-Korsel kembali terjadi akibat perebutan klaim kedua negara terhadap beberapa pulau yang disebut Dokdo dalam Bahasa Korea dan Takeshima dalam Bahasa Jepang. Jepang kembali mengeluarkan klaim yang menyatakan bahwa Pulau Dokdo adalah Pulau milik teritorial Jepang pada Buku Putih Pertahanan Jepang Tahun 2018. Jepang kemudian mengklaim hak kedaulatan Pulau Dokdo dan menyebutnya sebagai Pulau Takeshima.

Meskipun demikian, dalam perjalanan hubungan bilateralnya, kedua negara telah berupaya

memperbaiki hubungan. Pada akhir tahun 2016, misalnya, kedua negara pernah sepakat untuk membentuk kerja sama keamanan. Pada saat itu mereka berharap bahwa melalui pembentukan kerja sama bilateral dalam bidang keamanan, Jepang dan Korsel dapat membangun kembali rasa percaya di antara kedua negara dan kemudian akan memperkuat kerja sama bilateralnya.

### Implikasi terhadap Kawasan

Jepang-Korsel telah berupaya membangun kembali kerja sama bilateralnya. Namun, memori sejarah kelam keduanya masih terus membayangi warga Korsel sehingga sangat besar kemungkinan untuk menjadi pemicu konflik keduanya. Konflik keduanya pun punya kecenderungan meluas karena belum terdapat titik temu dari penyelesaian sejarah tersebut. Oleh karena itu, hal ini pun akan berdampak pada stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik, termasuk ASEAN di mana Indonesia berada di dalamnya.

Pada KTT ke-34 ASEAN di Thailand, tanggal 22 Juni 2019 yang lalu, ASEAN telah menyepakati bersama *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN untuk memiliki wawasan (*outlook*) mengenai masalah Indo-Pasifik, terutama di tengah situasi ketidakpastian global saat ini. Konsep *Outlook* ASEAN mengenai Indo-Pasifik ini merupakan konsep kerja sama negara-negara di sepanjang Samudera Hindia dan Pasifik dalam hal peningkatan kerja sama yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Wawasan ini juga mencerminkan sentralitas dan kekuatan ASEAN dalam menghormati perdamaian, budaya dialog, dan juga memperkokoh kerja sama.

Wawasan Indo-Pasifik ini pun menjadi penting agar terjadi kesepahaman di antara negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang dan Korsel) untuk menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan tersebut. Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara mengedepankan Indo-Pasifik sebagai Kawasan yang bebas dan terbuka (*free and open*). Sedangkan Indonesia berpandangan bahwa Indo-Pasifik harus dipahami secara lebih jauh, yakni memiliki karakter inklusif, transparan, dan komprehensif sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara di kawasan dan didasarkan pada komitmen bersama dalam rangka mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama.

Menyadari tingginya potensi konflik antara Jepang dan Korsel, maka AS sebagai mitra strategisnya, memandang penting untuk terlibat. Keterlibatan AS ini dilakukan atas permintaan Presiden Korsel Moon Jae-in. Presiden Moon memberitahukan mengenai adanya perselisihan dengan Jepang dan meminta AS untuk terlibat. Jepang dan Korsel merupakan dua sekutu penting AS di Kawasan Asia Pasifik. AS membutuhkan dukungan keduanya apalagi dengan masih adanya ancaman nuklir Korea Utara (Korut) yang mengancam stabilitas keamanan di Kawasan Asia Pasifik.

Selain berimplikasi terhadap keamanan di Kawasan, konflik kedua negara ini juga akan berdampak langsung terhadap

perekonomian Indonesia, khususnya investasi dan ekspor Indonesia. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dari Jepang dan Korsel di Indonesia termasuk besar, sehingga jika konflik ini berlangsung lama maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jepang merupakan negara ketiga terbesar di Indonesia dengan nilai investasi US\$1,13 miliar pada kuartal I 2019. Sementara Korsel menduduki posisi kedelapan terbesar dengan nilai investasi US\$269,5 juta (Alika, 2019).

Dampak selanjutnya dapat dilihat dari sisi perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Januari-Mei 2019, Jepang merupakan pasar ekspor nonmigas ketiga besar di Indonesia dengan nilai ekspor sebesar US\$5,67 miliar. Sementara Korsel berada pada posisi ketujuh besar dengan nilai US\$2,73 miliar (Alika, 2019). Hubungan strategis Indonesia dengan Jepang dan Korsel di bidang ekonomi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, dan DPR RI perlu mendukung melalui fungsi pengawasan dan peran diplomasinya.

### Penutup

Ketegangan hubungan Jepang-Korsel yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan, karena kedua negara tersebut termasuk ke dalam 10 negara mitra strategis Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia akan mengalami kerugian apabila ketegangan hubungan Jepang-Korsel semakin berkepanjangan dan

menimbulkan konflik. Untuk dapat mengantisipasi dampak konflik Jepang-Korsel, maka Pemerintah RI perlu menguatkan pasar ekspor nontradisionalnya, dan DPR RI perlu mendukung langkah pemerintah tersebut.

### Referensi

- Adityani, Fiandara Dwi. "Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu "Comfort Women" terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan", <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/19038/18096>, diakses 17 Juli 2019.
- Alika, Rizky. "Ekonom Peringatkan Perang Dagang Jepang-Korsel Lebih Berisiko Bagi RI", <https://katadata.co.id/berita/2019/07/09/ekonom-peringatkan-perang-dagang-jepang-korsel-lebih-berisiko-bagi-ri>, diakses 17 Juli 2019.
- Ashari, Khasan. "Konsep Indo-Pasifik ASEAN dan Kepemimpinan Indonesia", <https://nasional.sindonews.com/read/1415841/18/konsep-indo-pasifik-asean-dan-kepemimpinan-indonesia-1561765739>, diakses 22 Juli 2019.
- Berlinger, Joshua. "Perselisihan Militer antara Jepang Korea Selatan bisa jadi Krisis Asia Timur", <https://www.matamatapolitik.com/analisis-mengapa-perselisihan-militer-antara-jepang-dan-korea-selatan-bisa-berubah-menjadi-krisis/>, diakses 19 juli 2019.
- "Aset Jepang Diincar", *Kompas*, 17 Juli 2019, hal 4.
- "Jepang Perketat Ekspor ke Korsel

karena Alasan Keamanan”, *Republika*, 3 Juli 2019, hal 7.  
 “Jepang Kembali Mengklaim Kepemilikan Pulau Dokdo”, [http://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=i&Seq\\_Code=51456](http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=51456), diakses 18 Juli 2019  
 “Jokowi: ASEAN harus miliki "outlook" tentang Indo Pasifik”, <https://www.antarane.ws.com/berita/924127/jokowi->

[asean-harus-miliki-outlook-tentang-indo-pasifik](#), diakses 18 Juli 2019.

“Korean Boycott Could Spread to Japanese Luxury Cars”, *The Jakarta Post*, 23 Juli 2019, hal. 14.

“Korea Selatan Sambut Baik Outlook ASEAN Tentang Indo-Pasifik”, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/409/berita/korea-selatan-sambut-baik-outlook-asean-tentang-indo-pasifik#>, diakses 18 Juli 2019.



Lisbet

[lisbet.sihombing@dpr.go.id](mailto:lisbet.sihombing@dpr.go.id)

Lisbet, SIP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.